

BAB II

KAIDAH KRITIK HADIS

Sebelum meneliti lebih jauh tentang kualitas dan kehujaan hadis melalui analisa terhadap data data yang akan dipaparkan, maka pada bagian ini (BAB II) akan diketengahkan kaidah-kaidah yang melandasi penelitian ini yang meliputi: Langkah-langkah pengujian hadis, pengertian *al-Itibar*, hadis ahad dan kehujaan-nya, hadis ahad dalam masalah akidah serta substansi matan hadis yang tekstual dari kontekstual.

A. Langkah-Langkah Pengujian Hadis

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai upaya penelitian (pengujian) hadis, maka langkah-langkah (kegiatan) yang perlu dilakukan adalah:

Langkah Pertama: Takhrij al-Hadis (penelusuran hadis) Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui asal-usul riwayat hadis (yang diteliti) dalam kitab hadis induk, lengkap dengan sanad dan matannya, serta untuk mengetahui ada-tidaknya syahid dan mutabi (Syuhudi Ismail, 1991: 44).

Adapun metode yang dilakukan dapat berupa takhrij hadis bil al-Maudhu' (berdasarkan topik masalah), adakalanya berupa takhrij hadis bil laidni (berdasarkan lafadz).

Metode pertama dapat dilakukan dengan menggunakan kitab:

مفتاح كنوز السنة, sedang metode kedua antara lain dapat memperbantuan kitab: *المعجم المفهرس لافاظ الحديث النبوي*, yang keduanya merupakan susunan Dr. A. Weasinek dan kawan-

kawan (Syuhudi Ismail, 1991: 43). Disamping itu dapat

-ulama hadis kontemporer- mensyaratkan lebih longgar yaitu minimal empat orang sahabat, dengan catatan masing-masing mempunyai sejumlah murid yang tersebar di seluruh dunia Islam, ada dalam perjalanan periwayatan jumlah yang sedikit ini akan menghasilkan pengetahuan pasti, khususnya bagi mereka yang mengetahui karakter ulama awal (M.M. Azami, 1995: 63). Namun demikian, yang jelas para ulama sepakat bahwa *hadis mutawattir* ini dapat diterima kehujujahannya baik dalam masalah akidah, hukum syariat dan sebagainya.*

Adapun *hadis ahad*, yang secara bahasa sinonim dengan *wahid* yang berarti satu, adalah (secara istilah) hadis yang diriwayatkan satu orang atau lebih dalam setiap jenjang periwayatannya, dan jumlah itu tidak mencapai jumlah periwayat yang ditentukan dalam *hadis mutawattir* (Ali Mustafa Ya'qub, 1995: 131). Karena itu *hadis ahad* ini memiliki kualitas (periwayatan) di bawah *hadis mutawattir*. Kalau *hadis mutawattir* disepakati kehujujahannya, maka *hadis ahad* masih perlu diuji dan diteliti kualitasnya, apakah termasuk hadis yang *maqbul* (diterima) yang meliputi: *hadis shahih lidsatihi* (otentik dengan sendirinya), *shahih lighoirihi* (otentik karena keberadaan yang lain), *hasan lidsatihi* (serasi dengan sendirinya) dan *hasan lighoirihi* (serasi karena keberadaan yang lain).

berpendapat *hadis ahad* tidak bisa dijadikan sebagai *hujjah* dalam masalah akidah. Sedang sebagian ulama lain dari kalangan *Ahlussunnah* dan Ibnu Hazm al-Zhahiri berpendapat bahwa *hadis Shohih* itu dapat dijadikan *hujjah* dalam masalah akidah, dapat memberikan kepastian dan harus diyakini.

Pendapat pertama yang di antaranya dipegang oleh Syeikh Mahmud Syaltut dalam bukunya "*al-Islam Aqidah wa Syari'at*" di antaranya beralasan bahwa akidah memerlukan keimanan (kepercayaan), sedang iman artinya keyakinan yang bulat. Dan yang dapat memberikan keyakinan yang bulat hanyalah sesuatu yang pasti riwayatnya dan pasti tujuannya. Dan itu terdapat pada *hadis mutawattir*, bukan pada *hadis ahad* yang masih belum pasti (*dzan*) (Mahmud Syaltut, 2: 251). Pendapat ini juga dipegang oleh Muhammad al-Ghazali yang beralasan bahwa akidah haruslah berlandaskan keyakinan yang murni yang tidak tercampur oleh sedikitpun keraguan. Karena itu ia harus bersumber dari berita yang disampaikan secara *mutawattir* serta dibenarkan oleh akal. Tidak ada akidah yang hanya berdasarkan riwayat *ahad* atau rekaan pikiran (Muhammad al-Ghazali, 1993: 87).

Sedang golongan kedua, yang berpendapat bahwa *hadis ahad* dapat dijadikan *hujjah* dalam masalah akidah

badannya untuk menghadap ke Makkah, tanpa kemudian menanyakan berapa jumlah orang yang memberitahu itu. Padahal masalah kiblat adalah hal yang sangat prinsip dalam Islam.

Dari kedua pendapat tersebut, kiranya keduanya memiliki argumentasi dan alasan yang perlu dipertimbangkan. Pendapat pertama terkesan lebih ketat dalam memahami masalah-masalah akidah dan menangkal masuknya keyakinan (akidah) yang menyimpang. Akan tetapi kelemahannya, pendapat ini tidak didukung (menyertakan) dalil-dalil *nash* sehingga terkesan akal-akalan (Ali Musthafa Ya'qub, 1995: 136). Sebaliknya pendapat kedua yang didukung kuat oleh dalil *nash* tetapi batasan-batasannya masih terkesan rumit, mengingat adanya perbedaan tingkat kesahihannya. Dan terlebih lagi adanya hadis-hadis *ahad* bermuatan akidah yang nampaknya bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur'an, semisal hadis-hadis *israiliyat* yang banyak ditemukan dalam kitab-kitab hadis (Az-Zahabi, 1987: 211-212) sehingga cukup naif kalau melonggarkannya untuk dijadikan sebagai dalil dalam masalah akidah.

Karena itu diperlukan pemahaman dan pertimbangan kompromistik (*al-jama'*) terhadap kedua pendapat tersebut --sebagaimana yang telah ditradisikan oleh

para ulama--. Dalam arti, kehujjahan *hadis ahad* dalam masalah akidah ini harus dipertimbangkan secara hati-hati dan argumentatif (berdasarkan dalil) yang kuat (pasti), yang mungkin saja diperoleh dari *hadis ahad* yang benar-benar shahih, di samping al-Qur'an dan *al-hadis yang mutawattir*.

Sejalan dengan itu, kiranya tepat kalau Dr. Nuruddin Itr. membagi kedudukan hukum *hadis shahih* menjadi dua kelompok, yaitu:

*Kelompok pertama, hadis shahih yang tidak didukung faktor-faktor yang memperkuat keberadaannya. Keadaan seperti ini menunjukkan kunggulan yang tinggi, memantapkan hati untuk menerimanya dan kadang-kadang dianggap oleh sebagian orang --lebih-lebih mereka yang awam-- bahwa kondisi seperti ini memberi keyakinan akan otentisitasnya, wajib diamalkan dan dijadikan sumber hukum, namun tidak wajib diyakini dan diimani kepastian kandungannya. Karena rawi yang *tsiqat* itu tidak dijamin *ma'shum* dari kesalahan, mengingat banyak perawi *tsiqat* yang diperselisihkan *jarh* dan *ta'dilnya*. Hal inilah yang menempatkan posisi hadis yang shahih ini tidak mencapai derajat kepastian dan keyakinan yang wajib diimani dan akan menimbulkan kekafiran bagi orang yang menentanginya (Nuruddin Itr, 1994: 2: 7-8).*

Kelompok kedua, sebagian *hadis ahad* yang shahih, yakni kelompok hadis yang memberikan ilmu yang yakin dan wajib diyakini. Yaitu hadis-hadis yang memenuhi syarat-syarat keshahihan dengan pasti dan tidak menunjukkan kemungkinan lain, karena didukung oleh beberapa faktor penguat, di antaranya:

- a. Hadis tersebut disepakati oleh para ulama dapat dipakai *hujjah*.
- b. Hadis tersebut bersambung sanadnya dan diriwayatkan oleh para imam hadis yang kuat hafalannya, serta tidak *gharib*, sebagaimana kriteria yang ditetapkan oleh al-Asqalani.
- c. Hadis tersebut diriwayatkan dengan sanad yang disebut sebagai sanad paling shahih dan tidak *gharib*.

Hadis-hadis yang demikian memberikan ilmu yang yakin dan pasti bagi orang yang luas pengetahuannya tentang keadaan para rawi. Seperti hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar. Setiap *muhaddis* pasti akan mengakui keberadaan hadis-hadis Malik tersebut, karena mereka mengetahui hal kewaraan dan ketakwaan (integritas) serta ketinggian daya hafalnya (kredibilitas) yang menjauhkan perawi yang demikian dari berbuat kesalahan, karena itu ia

Karena itu dengan adanya penggabungan dari kedua segi (sanad dan matan) yang masing-masing tidak bisa dipisahkan satu sama lain itu, diharapkan penelitian hadis yang dilakukan dapat mencapai pemahaman secara utuh (komprehensif) sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman sikap secara langsung (*ma'mul bihi* atau *ghairu ma'mil bihi*) dalam aktivitas kehidupan sebagaimana fungsi idealnya.

Namun demikian untuk mencapai pemahaman seperti itu bukanlah hal yang mudah. Karena, di samping kompleksitas permasalahan sanad sendiri yang memerlukan kejelian dan ketelitian, juga tidak sedikit ditemukan adanya pertentangan (*ta'arudz*) pemahaman dalam hadis-hadis tersebut, baik itu antara sanad dengan matan (sanadnya shahih tetapi matannya dhaif atau sebaliknya), matan hadis satu dengan matan hadis yang lain (baik yang sama kualitasnya atau tidak), matan hadis dengan al-Quran dan sebagainya.

Untuk itu para ulama telah membahas dan mengajukan beberapa alternatif metode penyelesaiannya yang di antaranya adalah metode *Al-jam'u* (pengkompromian), metode *An-Nasikh wal Mansukh*, metode *at-Tarjih* dan metode *at-Tauqif* (Syuhudi Ismail, 1992 : 144-145, mengutip Ibnu Hajar, T.th : 24-25) yang

masing-masing digunakan dan diprioritaskan secara berurutan.

Selanjutnya dalam upaya memahami substansi hadis agar dapat difungsikan sebagaimana mestinya dalam kehidupan masyarakat yang teramat kompleks (majemuk), baik dari segi situasi, kondisi maupun tempat di mana mereka berada, maka diperlukan pemahaman dan pembahasan lebih jauh terhadap hadis. Sebab keberadaan Rasulullah sendiri, yang di samping sebagai manusia biasa, Rasulullah juga berperan sebagai kepala negara, pemimpin masyarakat, panglima perang, hakim (Syuhudi Ismail, 1994 : 4, mengutip Mantgomery Watt dan Philip K. Hitti), bagian dari komunitas Arab waktu itu dan sebagainya, yang dalam memberikan petunjuk, arahan dan suri teladan kehidupan sesuai dengan keadaan dan peran Nabi tatkala hadis itu terjadi.

Karena itu dalam memahami hadis adakalanya diperlukan pemahaman tekstual, adakalanya pula diperlukan pemahaman kontekstual. Pemahaman dan penerapan hadis secara tekstual (tersurat) dilakukan bila hadis yang bersangkutan, setelah dihubungkan dengan segi-segi yang berkaitan dengannya, misalnya latar belakang terjadinya, tetap menuntut pemahaman sesuai dengan apa yang tertulis dalam teks hadis yang

